

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

MATA KULIAH : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

NOMOR KODE/SKS :

DESKRIPSI SINGKAT : Mata kuliah ini menjelaskan uraian secara komprehensif pelajaran hukum administrasi negara untuk memberikan pemahaman praja tentang pengertian dan ruang lingkup, sejarah dan hubungan sumber-sumber hukum, objek dan subjek, kedudukan, fungsi dan asas HAN, bentuk-bentuk perbuatan administrasi negara, syarat-syarat pembentukan suatu ketetapan, budaya hukum, kewenangan dan tindakan, perlindungan, penjabaran hak dan pertanggungjawaban, hak dalam HAN, bagian-bagiannya dan peradilan Tata Usaha Negara.

STANDAR KOMPETENSI : Setelah mengikuti mata kuliah ini praja dapat membuat keputusan yang strategik

No	Kompetensi Dasar	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Waktu	KBM	Media	Sumber Pustaka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pada akhir perkuliahan praja mampu menerangkan peristilahan dan pengertian daripada hukum administrasi Negara serta memberikan gambaran dari ruang lingkupnya	Pengertian dan ruang lingkup HAN	1. Peristilahan 2. Pengertian HAN 3. Ruang Lingkup HAN	150	- Kuliah - mimbar - Diskusi - Tanya jawab	- Bahan tulis - OHP - powerpoint - Plifchart - handout	Dr. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. W.F. Prins, Inleiding in het Administrasi Recht van Indonesie. Dimock & Dimock, Administrasi Negara.
2.	Pada akhir perkuliahan diharapkan praja dapat menjelaskan sejarah daru HAN dan HTN serta hubungannya antara HAN dan HTN.	Sejarah HAN dan hubungan HTN dengan HAN	1. Sejarah HAN 2. Hubungan HAN dan HTN	sda	Sda	Sda	Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, Public Administration. Prof. Mr. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara.

3.	Pada akhir perkuliahan praja mampu mengetahui lingkup, sumber baik dalam hukum materil maupun formil serta dapat menjelaskan tentang sumber-sumber hokum formil HAN	Sumber-sumber HAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian sumber hukum 2. Macam-macam sumber hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber hukum materil b. Sumber hukum formal 3. Sumber hukum formal HAN 	150	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah mimbar - Diskusi - Tanya jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan tulis - OHP - powerpoint - Plifchart - handout 	<p>Prof. Mr. A.D. Belinfante, Pokok-Pokok hukum Administrasi Negara.</p> <p>Drs. Phil. Eka Darmaputera, Etika sederhana Untuk Semua.</p> <p>Prof. Dr. Winardi, S.E., Teori sistem dan Analisis Sistem.</p> <p>Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Prof. Mr. Djokosoetono, Hukum Tata Negara</p> <p>Daliyo dkk. Pengantar Hukum Indonesia</p> <p>Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si, MH dan Achmad Sodik Sudrajat, SH, MH. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik</p>
4.	Pada akhir perkuliahan diharapkan praja dapat menjelaskan tentang objek dan subjek dalam HAN	Objek dan subjek HAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek studi ilmu HAN 2. Objek HAN 3. Subjek HAN 	150	sda	sda	<p>Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, edisi 2000</p> <p>Prof. Dr. Sudargo Gautama, pengertian tentang Negara hukum</p> <p>Dimock & Dimock, Administrasi Negara.</p>
5.	Pada akhir perkuliahan praja diharapkan dapat menjelaskan kedudukan	Kedudukan, Fungsi HAN, asas-asas HAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan HAN dalam ilmu hukum 2. Fungsi ilmu HAN 	150	sda	sda	<p>Prof. Mr. A.D. Belinfante, Pokok-Pokok hukum Administrasi</p> <p>Dr. E. Utrecht, Pengantar Hukum</p>

	HAN serta fungsi dan tugas daripada HAN		3. Fungsi HAN 4. Asas HAN				Administrasi Negara Indonesia. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara.
6.	Pada akhir perkuliahan diharapkan praja menjelaskan pendelegasian, ketetapan serta HAN, dapat memberikan contoh tentang pembuatan surat	Bentuk-bentuk pembuatan Administrasi negara	1. Delegasi penemuan 2. Ketetapan Adm. Negara 3. Macam-macam ketetapan 4. Dispensasi, verguning, resensi dan koreksi 5. Perintah, panggilan dan undangan	150	- Kuliah mimbar - Diskusi - Tanya jawab	- Bahan tulis - OHP - Plifchart - handout	Prof. Mr. A.D. Belinfante, Pokok-Pokok hukum Administrasi Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, Public Administration. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara.
7.	UTS						
8.	Pada akhir perkuliahan praja mampu menjelaskan tentang teori dari keputusan dan ketetapan serta menjelaskan tentang kekuatan dari suatu ketetapan	Syarat-syarat untuk pembentukan suatu ketetapan	1. Teori keputusan, peraturan dan ketetapan 2. Ketetapan yang mengandung kekurangan 3. Kekuatan hukum dari ketetapan hukum yang sah 4. Perbuatan pemerintah yang tidak layak	sda	sda	sda	Dr. H. De Vos, Pengantar Etika Prof. MR. Djoko Sutomo, Hukum Tata Negara. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara. Richard Beckhard, Pengembangan Organisasi Strategi dan model Dimock & Dimock, Administrasi Negara.
9.	Pada akhir perkuliahan diharapkan praja dapat	Budaya Hukum	1. Pengertian budaya hukum 2. Proses pembudayaan	sda	sda	sda	Prof. Mr. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara

	mengetahui tentang pengertian budaya hukum, proses pembudayaan hukum, faktor intern manusia, kepatuhan kepada hukum positif, kesadaran moral dalam proses pembudayaan hukum.		<p>hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dua faktor intern manusia yang mempengaruhi kepatuhan kepada hukum positif 4. Kesadaran moral dalam proses pembudayaan hukum 5. Teori kesadaran moral dari Lawrence Kohiberg 				<p>Hukum.</p> <p>Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, Public Administration.</p> <p>W.F. Prins, Inleiding in het Administrasi Recht van Indonesie.</p> <p>Dimock & Dimock, Administrasi Negara.</p>
10.	Pada akhir perkuliahan praja diharapkan dapat menjelaskan tentang Kewenangan HAN, Asas legalitas dan wewenang HAN, Sumber dan cara memperoleh wewenang HAN, Tindakan HAN, Pengertian tindakan HAN, Unsur, macam-macam dan karakteristik tindakan HAN	Kewenangan dan tindakan HAN	<p>Kewenangan HAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas legalitas dan wewenang HAN 2. Sumber dan cara memperoleh wewenang HAN. <p>Tindakan HAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tindakan HAN 2. Unsur, macam-macam dan karakteristik tindakan HAN 	150	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - mimbar - Diskusi - Tanya jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan tulis - OHP - powerpoint - Plifchart - handout 	<p>Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Prof. MR. Djoko Sutomo, Hukum Tata Negara.</p> <p>Dr. Franz Von Magnis, Etika Umum, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral.</p> <p>Dr. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.</p> <p>W.F. Prins, Inleiding in het Administrasi Recht van Indonesie.</p>
11.	Pada akhir perkuliahan praja diharapkan mengetahui tentang Perlindungan Hukum dalam bidang perdata, Perlindungan hukum dalam bidang publik, Penegakan hukum	Perlindungan Hukum, penegakan Hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam HAN	<p><u>Perlindungan Hukum</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum dalam bidang perdata 2. Perlindungan hukum dalam bidang publik <p>Penegakan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum dalam HAN 	sda	sda	sda	<p>Prof. Mr. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum.</p> <p>Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara.</p> <p>Dimock & Dimock, Administrasi Negara.</p>

	dalam HAN, Macam-macam sanksi dalam HAN, Pengertian pertanggungjawaban, Aspek teoritis pertanggungjawaban HAN		2. Macam-macam sanksi dalam HAN Pertanggungjawaban 1. Pengertian pertanggungjawaban 2. Aspek teoritis pertanggungjawaban HAN				Prof. Mr. A.D. Belinfante, Pokok-Pokok hukum Administrasi
12.	Pada akhir perkuliahan praja diharapkan mengetahui , Undang-Undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan dan bangunan (PBB), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan laut	Hukum Administrasi Negara dan Bagian-bagiannya	1. Undang-Undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan dan bangunan (PBB) 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 4. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan laut	150	- Kuliah mimbar - Diskusi - Tanya jawab	- Bahan tulis - OHP - Plifchart - handout	Dr. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara. Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, edisi 2000 Dimock & Dimock, Administrasi Negara.
13.	Pada akhir perkuliahan ini praja mampu mengemukakan pengertian PTUN, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha	Peradilan tata usaha negara	1. Pengertian 2. UU No. 5 / 1986 3. Tempat kedudukan 4. Kekuasaan peradilan 5. Pemeriksaan tingkat banding 6. Pemeriksaan tingkat	sda	sda	sda	Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara. Prof. MR. Djoko Sutomo, Hukum Tata Negara. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum

	Negara, mengenai tempat kedudukannya.		kasasi 7. Pengertian TUN + AOM				Administrasi Negara.
14.	UAS						